

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara. Dengan adanya pendidikan maka akan menjadikan masyarakat di suatu negara tidak tertinggal dengan negara lain. Melalui pendidikan masyarakat akan mempunyai pengetahuan yang nantinya akan digunakan dalam kehidupan. Namun tidak hanya untuk memperoleh pengetahuan saja, pendidikan juga salah satu upaya untuk menumbuhkan budi pekerti sebagai kekuatan batin, karakter, maupun pikiran anak. Mengingat pendidikan merupakan komponen penting, maka pemerintah menerapkan pendidikan karakter salah satunya melalui pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang.

Adanya pendidikan karakter di sekolah merupakan hal yang menarik untuk diwujudkan karena karakter tidak muncul dengan sendirinya namun harus dibentuk. Meskipun perkembangan karakter setiap manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor bawaan (*nature*) dan faktor lingkungan (*nuture*) maka dari itu melalui pendidikan karakter anak diharapkan bertingkah laku sesuai dengan perilaku Pancasila. Pendidikan karakter di sekolah dapat diterapkan melalui mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan (PPKn).

Perwujudan pendidikan karakter merupakan prioritas bagi pemerintah. Dimulai pada zaman pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla telah diadakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang digulirkan pada tahun 2016. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 BAB I, Pasal (1) bahwa “Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikiran, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)¹”.

Dari peraturan tersebut pendidikan karakter dapat diperoleh melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal yang saling bekerjasama dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter yang melibatkan olah hati, olah rasa, olah pikiran, dan olah raga terutama nilai-nilai religius, jujur, toleransi, kreatif, mandiri, disiplin, bekerja keras, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, komunikatif, cinta tanah air, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, gemar membaca, menghargai prestasi, bertanggungjawab, dan demokratis. Dengan tertanamnya nilai-nilai tersebut

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2017/ps87-2017.pdf> diakses pada tanggal 5 November 2019, pukul 09.04 WIB

pada masyarakat, maka masyarakat tidak hanya mempunyai pengetahuan namun juga memiliki karakter yang ideal. Dari nilai-nilai yang dikembangkan dalam Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) tersebut, maka peneliti memilih subnilai demokrasi untuk dijadikan sebagai bahan penelitian yang merupakan subnilai dari nilai gotong royong. Nilai demokrasi tersebut akan diterapkan melalui mata pelajaran PPKn di kelas II Sekolah Dasar.

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (*epistemologis*) dan istilah (*terminologis*) yaitu “secara epistemologis demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan”². Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah suatu keadaan Negara dimana sistem pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. artinya kekuasaan tertinggi di Negara tersebut dipegang oleh rakyat.

Menurut UUD 1945 BAB I tentang Bentuk dan Kedaulatan, pasal 1 ayat (2) hasil perubahan berbunyi, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”³ Dengan demikian, UUD 1945 menegaskan bahwa Pemerintahan di Indonesia merupakan pemerintahan

² Dwi Sulisworo, dkk, “*Demokrasi*”, Hibah Materi Non Konvensional 2012, h.2.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya, dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1945/UUDTAHUN~1945UUDPenj.htm>, yang diakses pada hari Senin, 11 November 2019 pada pukul 14.40 WIB.

yang demokrasi dimana kedaulatan sepenuhnya ditangan rakyat dan kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat.

Dalam praktiknya, pemerintahan yang berdasarkan atas demokrasi mempunyai beberapa pilar yang menjadi indikator sebuah pemerintahan demokrasi konstusional. Menurut pakar politik J.Kristiadi “sepuluh pilar demokrasi sebagai berikut:

(1) kedaulatan rakyat; (2) pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah; (3) kekuasaan mayoritas (hasil Pemilu); (4) jaminan hak-hak minoritas; (5) jaminan hak-hak asasi manusia; (6) persamaan di depan hukum; (7) proses hukum yang berkeadilan; (8) pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi; (9) pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; dan (10) dikembangkannya nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.”⁴

Dengan adanya pilar tersebut, peran negara dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun kehidupan yang berdemokrasi.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat seharusnya menyadari bahwa saat ini negara ini sedang mengalami degradasi moral dan karakter yang dapat dikatakan akut. Berbagai kriminalitas dan tindakan anarkis, banyak kejahatan di dunia nyata maupun dunia maya, media sosial dijadikan sebagai salah satu alat untuk menyebarkan kebohongan semata, masyarakat asal menyebarkan berita dan asal berkata dengan berdalih kebebasan berpendapat. Maka dapat dikatakan degradasi moral yang sedang terjadi salah satunya yaitu kurangnya penerapan nilai demokrasi dalam diri

⁴ A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan : Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015) h. 86

masyarakat Indonesia. Kita tidak bisa tutup mata ataupun tutup telinga dengan demokrasi yang ada di negara Indonesia saat ini.

Di kelas II sekolah dasar, pada buku guru dan buku siswa tepatnya dalam buku tema 1 “Hidup Rukun” Subtema 3 “Hidup Rukun di Sekolah”, peserta didik diharuskan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam Pancasila. Melalui pembelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan (PPKn), peserta didik menerapkan bentuk demokrasi yang terdapat dalam lingkungan sekolah. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pembelajaran demokrasi yang di lakukan sejak dini sebagai bekal dalam kehidupan peserta didik dalam menempuh kehidupan kedepannya.

Hasil wawancara pada tanggal 15 Agustus 2019 di SDN Kelapa Dua Wetan 01 Pagi, yaitu dengan melakukan wawancara kepada wali kelas di kelas II dapat diperoleh data sebagai berikut: Di kelas II SDN Kelapa Dua Wetan 01 Pagi sudah mendapatkan pelajaran mengenai materi demokrasi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn), namun banyak siswa yang belum memahami tentang konsep dari demokrasi tersebut. Hal ini nampak pada hasil penilaian yang dilakukan oleh wali kelas setelah pembelajaran berlangsung. Wali kelas mengadakan evaluasi dengan meminta siswa mengerjakan soal mengenai demokrasi, namun dari hasil penilaian tersebut diperoleh data sebesar 65% memahami konsep dan nilai-nilai demokrasi sedangkan 35% siswa belum memahami dengan baik. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru hanya menggunakan buku tematik. Berdasarkan

hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti, masih banyak siswa yang kurang menghargai pendapat temannya serta tidak menghargai keputusan yang dibuat melalui musyawarah.

Dengan adanya keadaan tersebut, penting untuk memperbaiki keadaan saat ini agar kedepannya negara dapat menjadi lebih baik dengan cara menanamkan pendidikan karakter demokrasi sejak dini melalui sekolah dasar karena anak-anak di sekolah dasar masih belum terkontaminasi dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dengan adanya penerapan karakter demokratis di sekolah dasar diharapkan tingkah laku maupun tindakan peserta didik akan sesuai dengan pengamalan nilai-nilai demokrasi sehingga nantinya peserta didik akan menjadi masyarakat yang pluralis dan demokratis yang mempunyai sikap toleransi, bebas mengemukakan dan menghargai perbedaan dalam setiap pribadi manusia, menjadi manusia yang bermartabat, terbuka dengan adanya perubahan namun tetap taat pada nilai-nilai Pancasila, percaya diri, saling menghargai, dan mempunyai rasa kebersamaan. Hal tersebut dapat diperoleh melalui pembelajaran di kelas dengan menggunakan media yang menarik agar siswa tidak bosan dengan penjelasan yang hanya berupa teori saja.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti tertantang dan tertarik untuk mengatasinya dengan melakukan penelitian *Research and Development* dengan judul *Pengembangan buku cerita bergambar yang berbasis Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)*

demokrasi untuk kelas II Sekolah Dasar. Hasil penelitian serupa dilakukan oleh Yulaefah⁵. Tujuan Yulaefah mengembangkan buku cerita berbasis pendidikan karakter untuk siswa kelas II sekolah dasar. Buku cerita yang dibuat berkaitan dengan 7 “Kebersamaan” di kelas II sekolah dasar. Berdasarkan hasil pengembangan Yulaefah, peneliti mempunyai relevansi pada pengembangan buku cerita, relevansi yang terdapat adalah keduanya mengembangkan buku cerita berbasis penguatan pendidikan karakter. Perbedaan buku cerita yang dikembangkan Yulaefah dengan penelitian ini adalah adanya inovasi dalam penelitian ini yaitu dengan mengembangkan buku cerita berbasis penguatan pendidikan karakter yang terfokus pada sikap demokratis di sekolah dasar.

Sebelumnya, buku cerita bergambar berbasis penguatan pendidikan karakter sudah banyak. Namun sedikit buku cerita yang menjelaskan mengenai nilai-nilai demokrasi, padahal pada kenyataannya nilai demokrasi dirasakan masih kurang pada diri anak kelas II. Salah satu buku cerita yang berisikan nilai-nilai demokrasi adalah buku cerita karangan Fadila Hanum yang berjudul “Indahnya Demokrasi”. Buku cerita tersebut desainnya menarik, warna dari gambar sesuai dengan karakter anak-anak, dan terdiri dari berbagai cerita yang memuat nilai-nilai demokrasi. Namun kekurangan dari buku tersebut adalah banyaknya teks cerita pada setiap halamannya sehingga memungkinkan siswa untuk mudah bosan dalam membaca, selain itu gambar

⁵ Yulaefah, *Model Buku Cerita Berbasis Pendidikan Karakter Pada Siswa Kelas II Sekolah Dasar*, Skripsi (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2019)

yang ada dalam cerita tersebut hanya sedikit dan sebagian besar berukuran kecil sehingga kurang menarik rasa perhatian siswa.

Menurut Halim, kehadiran buku cerita bergambar menjadi sesuatu yang umum dan sangat disukai oleh anak-anak. Dipakai juga sebagai salah satu sumber pembelajaran. Menarik sebagai sumber pembelajaran, karena cerita dapat divisualisasikan dengan gambar dan warna-warna yang menarik sesuai dengan alur dan latar cerita.⁶ Dengan buku cerita bergambar anak akan lebih termotivasi dalam membaca dan memaknai isi dari bacaan buku cerita.

Dengan mengembangkan buku cerita bergambar berbasis penguatan pendidikan karakter demokrasi sebagai media pembelajaran pada pembelajaran PPKn di Kelas II sekolah dasar, peneliti bertujuan agar buku cerita tersebut dapat membantu peserta didik untuk mengerti, memahami, dan mengimplementasikan sikap demokratis dalam kehidupan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu :

1. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai pembelajaran demokrasi di sekolah kurang menarik.
2. Sikap demokratis yang dimiliki siswa masih rendah.

⁶ Dellya Halim. *Dampak Pengembangan Buku Cerita Bergambar Untuk Anak Usia Dini*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. (Jakarta: Pascasarjana FIP Universitas Pelita Harapan, 2019) h.204

3. Sumber belajar yang digunakan oleh guru hanya buku tematik saja.
4. Siswa hanya mengerti tentang demokrasi namun masih banyak yang kurang mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Adanya beberapa contoh pelaksanaan demokrasi di sekolah tidak cukup dapat membuat siswa memahami dan menerapkan dengan baik mengenai demokrasi.
6. Rendahnya rasa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya demokrasi di zaman yang semakin modern.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka untuk memudahkan penelitian ini permasalahan dibatasi pada peningkatan sikap demokrasi melalui pengembangan sebuah media pembelajaran yaitu Pengembangan Media Buku Cerita Bergambar Berbasis Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Sikap Demokrasi pada Pembelajaran PPKn di Kelas II SD.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, fokus masalah, dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
Bagaimana mengembangkan media buku cerita bergambar berbasis Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Sikap Demokrasi pada Pembelajaran PPKn di Kelas II SD?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian pengembangan media buku cerita bergambar berbasis Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Sikap Demokrasi pada pembelajaran PPKn di kelas II SD yang dapat dilihat dari dua sudut pandang:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangsih buku cerita bergambar dengan berbasis penguatan pendidikan karakter sikap demokrasi di kelas II SD yang sesuai dengan perkembangan siswa sekolah dasar.

2. Secara Praktis

a. Bagi siswa SD

Hasil penelitian pengembangan ini diharapkan dapat memotivasi dalam meningkatkan kebiasaan membaca dan membantu dalam pembentukan karakter demokrasi sejak dini yang disesuaikan dengan perkembangan siswa.

b. Bagi Guru

Hasil penelitian pengembangan ini diharapkan dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan buku bacaan dalam memaksimalkan kegiatan pembelajaran demokrasi di sekolah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian pengembangan ini diharapkan dapat dijadikan referensi jika melakukan penelitian dengan masalah serupa, khususnya dalam mengembangkan buku cerita berbasis Penguatan Pendidikan Karakter Sikap Demokrasi di sekolah dasar.



